

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 TERKAIT PUTUSAN PERCERAIAN TANPA AKTA PERKAWINAN
DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA
(Studi Putusan Nomor: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)**

Oleh

Komang Putrayasa, NIM. 1714101019

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus kasus perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja serta (2) mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Putusan Perceraian Tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif dan dengan teknik pengumpulan sampel yaitu *purposive sampling* serta subjek pada penelitian ini diantaranya Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja, Advokat di Kabupaten Buleleng dan Masyarakat yang pernah mengalami perkara Perceraian tanpa Akta Perkawinan. Adapun objek dari penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta ketentuan yang mendukung penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi di Pengadilan Negeri Singaraja dan Kantor Advokat di Buleleng. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian tanpa didasari dengan akta perkawinan berpacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pendapat Sarjana. Walaupun demikian, ketentuan lain yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hakim untuk memutus perkara perceraian seperti Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan ketentuan lainnya. Melihat hal tersebut, implementasi Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terkait Perceraian tanpa Akta Perkawinan di Pengadilan Negeri Singaraja belum terealisasi secara maksimal yang disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait administrasi kependudukan sehingga masih adanya masyarakat yang belum mendaftarkan perkawinannya di catatan sipil serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian masih belum relevan dan masih membutuhkan banyak pertimbangan bahan hukum lainnya yang menunjang ketentuan terkait perceraian.

Kata-kata kunci: putusan, perceraian, akta perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

**IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 9 OF
1975 CONCERNING IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 1 OF 1974
REGARDING DIVORCE DECISIONS WITHOUT MARRIAGE
CERTIFICATES IN THE STATE COURT OF SINGARAJA
(Study of Decision Number: 232/Pdt.G/2020/PN.Sgr)**

By

Komang Putrayasa, NIM. 1714101019

Law Department

ABSTRACT

This study aimed at finding out the judges' considerations in deciding divorce cases without being based on a marriage certificate at the Singaraja District Court and (2) knowing the implementation of Government Regulation No. 9/1975 concerning the Implementation of Law No. 1/1974 regarding Divorce Decisions without a Marriage Certificate. at the Singaraja District Court. This study uses an empirical juridical method that is descriptive and with a sample collection technique that is purposive sampling and the subjects in this study include judges at the Singaraja District Court, advocates in Buleleng Regency and people who have experienced divorce cases without a marriage certificate. The object of this research is Government Regulation No. 9/1975 concerning the Implementation of Law No. 1/1974 along with the provisions that support this research. The data collection techniques used in this research are document study techniques, interview techniques and observation techniques at the Singaraja District Court and Advocate's Office in Buleleng. The results of this study indicate that the judge's consideration in deciding divorce cases without being based on a marriage certificate is based on the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law No. 1/1974 and the opinion of a Bachelor. However, there are other provisions that can be used as judges' considerations to decide divorce cases, such as Government Regulation No. 9/1975, Law No. 23/2006, Supreme Court Circular No. 3/2018 and other provisions. Seeing this, the implementation of Government No. 9/1975 regarding Divorce without a Marriage Certificate at the Singaraja District Court has not been fully realized due to the low level of public knowledge regarding population administration so that there are still people who have not registered their marriages in the civil registry as well as judges' considerations in deciding cases. divorce is still not relevant and still requires a lot of consideration of other legal materials that support the provisions related to divorce.

Keyword: decision, divorce, marriage certificate, Government Regulation Number 9 of 1975.